



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telepon / Faksimile (0331) 428823

Laman inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, 13-6 - 2025

Nomor : 700.1.2.1/ ⁶³ /IR.1/35.09.410/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan Tahun 2025 atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air
Kabupaten Jember

di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Jember a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/135/IR.3/Evaluasi AKIP/35.09.410/2025 tanggal 2 Juni 2025 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Ratno C. Sembodo, S.H.

Wakil Penanggung Jawab : Adif Candra P., S.E.

Pengawas Tim : Penny Artha Medya, S.E.

Ketua Tim : Sutik Aspiin, S.E
Anggota Tim : M. Riswanda Imawan, S.E
Lutman Hakim.

2. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Periode Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 dan 10 s.d. 11 Juni 2025.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

6. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

7. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember adalah:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
 - b. pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
 - d. pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
 - e. pendataan, pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air diluar fungsinya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Bagian Organisasi yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 yang merupakan perwujudan hasil kinerja

instansi yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No.	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Dengan Menguraikan Informasi Secara Jelas dan Terperinci terkait kendala yang Di Hadapi Serta Langkah / Upaya perbaikan Inovatif Untuk Mengatasi Kendala Tersebut	Segera Menyusun Dokumen Perencanaan Yaitu Dengan Menentukan Tujuan dan Sasaran, menganalisis Situasi, Pengalokasian Sumber Daya Dengan Efektif. Komunikasi dan Koordinasi	Dokumen Perencanaan Kinerja	Bulanan, Triwulanan, I Semwsteran, dan tahunan	Telah ditindaklanjuti
2	Pengumpulan Data Kinerja Sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi Dengan Aplikasi Mandiri yang Sesuai	Mengumpulkan Semua Data Kinerja Dengan Menggunakan Teknologi Informasi	Data Kinerja yang terkumpul memanfaatkan Teknologi Informasi	Bulanan, Triwulanan, I Semwsteran, dan tahunan	Telah ditindaklanjuti
3	Menyusun Pedoman Teknis yang Lengkap dan Jelas Mengenai Prosedur Metodologi dan Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Segera Menyusun Pedoman Teknis yang Lengkap dan Jelas Tanpa Mengabaikan Prosedur metodologi Serta Macam-macam Evaluasi Akuntabilitas Internal	Pedoman teknis Evaluasi Kuntabilitas Kinerja Internal BM&SDA Pengembangan Aplikasi	Tahunan	Telah ditindaklanjuti
4	Menggunakan Teknologi Informasi atau Aplikasi Mandiri Secara Konsisten dan efektif Dalam Seluruh Proses Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dalam Proses Evaluasi Akuntabilitas Internal Segera Menggunakan Teknologi Informasi	Pengembangan Aplikasi	Tahunan	Telah ditindaklanjuti

10. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember Tahun 2025 menunjukkan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai sebesar **78,73**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	27,00
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	22,28
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	13,03
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,42
J U M L A H		100	78,73

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat Perencanaan kinerja yang tidak melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga hasilnya kurang relevan dan sulit untuk diimplementasikan
- Perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja belum berdasarkan pada hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- Perbaikan belum didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja sebelumnya. Dengan menganalisis apa yang sudah dicapai dan apa yang belum, dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam perencanaan.
- Kinerja individu belum selaras dengan organisasi mengindikasikan bahwa upaya setiap anggota tim berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sehingga Pimpinan di setiap level kehilangan kontrol terhadap pencapaian target bawahannya yang mengakibatkan laporan kinerja kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;
- b. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi karena pengukuran evaluasi dan pengukuran kinerja tidak dilakukan berjenjang hingga level individu yang berdampak pada pegawai belum seluruhnya memahami, menurunnya kualitas akuntabilitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan sehingga kurang berkontribusi signifikan terhadap capaian target kinerja

3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara konsisten dan mendalam serta belum memuat perbandingan antara data capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan, terutama untuk periode yang sudah berakhir;
- b. Membandingkan realisasi kinerja dengan tolok ukur (benchmark) di tingkat nasional atau internasional untuk menilai seberapa baik organisasi tersebut berkinerja dibandingkan dengan yang lain;
- c. Laporan kinerja belum jelas dan akurat memberikan gambaran yang transparan tentang pencapaian tujuan organisasi sehingga setiap pegawai bertanggung jawab atas informasi yang mereka laporkan dan memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Belum mempunyai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara sesuai standar dan berjenjang hingga level individu hanya sekedar formalitas pelaporan;
- c. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak berpengaruh pada perbaikan kinerja periode berikutnya;
- d. Nilai SAKIP belum mengalami peningkatan akibat perbaikan tindak lanjut implementasi SAKIP yang sistematis;
- e. Rencana aksi belum menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator;.

11. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah diuraikan di atas, serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a) Perencanaan kinerja melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, hasilnya biar relevan dan mudah untuk diimplementasikan
- b) Perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan pada hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- c) Perbaikan didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja sebelumnya. Dengan menganalisis apa yang sudah dicapai dan apa yang belum, dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam perencanaan.
- d) Kinerja individu selaras dengan organisasi mengindikasikan bahwa upaya setiap anggota tim berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama
- e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sehingga Pimpinan di setiap level tidak kehilangan kontrol terhadap pencapaian target bawahannya yang mengakibatkan laporan kinerja kurang akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya;
- f) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi karena pengukuran evaluasi dan pengukuran kinerja dilakukan berjenjang hingga level individu yang berdampak pada seluruh pegawai memahami secara keseluruhan sehingga berkontribusi signifikan terhadap capaian target kinerja;
- g) Dokumen Laporan Kinerja direviu secara konsisten dan mendalam serta memuat perbandingan antara data capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan, terutama untuk periode yang sudah berakhir;
- h) Membandingkan realisasi kinerja dengan tolok ukur (benchmark) di tingkat nasional atau internasional untuk menilai seberapa baik organisasi tersebut berkinerja dibandingkan dengan yang lain.
- i) Laporan kinerja memberikan gambaran yang transparan tentang pencapaian tujuan organisasi sehingga setiap pegawai bertanggung jawab atas informasi yang mereka laporkan dan memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan
- j) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara sesuai standar dan berjenjang hingga level individu;
- k) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal berpengaruh pada perbaikan kinerja periode berikutnya;
- l) Bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Nilai SAKIP mengalami peningkatan akibat perbaikan tindak lanjut implementasi SAKIP yang sistematis;
- m) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2025.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja, Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa
Wakil Penanggungjawab
Adif Candra Purdhina, S.E.

Pengawas Tim
Penny Artha Medya, S.E.

Ketua Tim
Sutik Aspiin, S.E.

Anggota:

1. M. Riswanda Imawan, S.E.

2. Lutman Hakim

: 
: 
: 
: 
: 



Inspektur,
Ratno C. Sembodo, S.H.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP.197408272005011006